

## *Kritik Atas Ekonomi Pasar Bebas*

**Alexander Seran**

**ABSTRAKSI.** Tulisan ini merupakan kajian atas pemikiran Karl Polanyi dalam *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time* berhadapan dengan pemikiran Jürgen Habermas dalam *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry Into Category of Bourgeois Society*. Polanyi menganalisis sejarah muncul dan runtuhnya masyarakat pasar di abad ke sembilan belas, sementara Habermas menganalisis sejarah masyarakat borjuis Eropa di abad ketujuh belas dan delapan belas yang merupakan model dari masyarakat kapitalis modern. Keduanya sampai pada kesimpulan yang sama bahwa warga negara yang terdeliberasi memungkinkan terbentuknya opini publik yang rasional yang secara kritis dapat mengawal sistem politik demi mencapai integrasi sosial.

**KATA KUNCI:** Pasar bebas, kapitalisme, transformasi, ruang publik, ketercakupan ekonomi dan masyarakat, masyarakat warga negara, budaya politik liberal, sistem demokrasi dan negara hukum.

**ABSTRACT.** *This article examines the main theory of Karl Polanyi's *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time* vis-à-vis Jürgen Habermas' thought in *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry Into Category of Bourgeois Society*. Polanyi analyzes the history of the rise and fall of nineteenth century market society whereas Habermas analyzes the history of the late seventeenth and eighteenth century of European Bourgeois public sphere as the model of re-coupling the economy and society in modern capitalist states. Both Polanyi and Habermas come to a conclusion that informal citizen deliberation enabling the formation of rational public opinion that guides critically political system for the sake of social integration.*

**KEY WORDS:** *Free market, capitalism, transformation, public sphere, embeddedness, civil society, liberal political culture, democracy.*

## 1. PENDAHULUAN

Pemikiran moral mengenai ekonomi telah berkembang di kalangan ilmuwan antropologi, sejarah, dan ekonomi namun hanya mendapat perhatian yang terbatas dari ilmuwan politik. Tujuan artikel ini adalah menyediakan sebuah pijakan mengenai bagaimana seharusnya ilmuwan politik maupun filosof politik yang berkecimpung dalam merumuskan teori normatif mengenai ekonomi harus menyertakan pandangan kritis mereka tentang pasar dalam era modern. Hal ini penting karena analisis kritis mengenai moral ekonomi akan memberi masukan yang berarti bagi pemerintah, khususnya di negara-negara berkembang dalam menentukan pilihan pembangunan secara tepat.

Salah satu analisis kritis mengenai pentingnya moral dalam ekonomi adalah kritik ekonomi pasar bebas yang mempertanyakan, apakah pasar bisa mengatur dirinya sendiri? Pemikiran Karl Polanyi mengenai ketercakupannya ekonomi dan masyarakat serupa dengan pemikiran Jürgen Habermas mengenai integrasi subsistem ekonomi dan subsistem masyarakat dalam dunia kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Artikel ini dimaksudkan untuk menunjukkan hubungan tak terpisahkan antara ekonomi dan masyarakat dalam pemahaman teori ekonomi pasar bebas secara tepat, sesuai tujuan hakiki praksis ekonomi, yakni perwujudan kesejahteraan bersama.

Tesis utama buku Karl Polanyi *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time* (1944) dan buku Jürgen Habermas *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry Into Category of Bourgeois Society* (1986) berbunyi: pasar yang mengatur dirinya sendiri mengakibatkan pasar tidak bebas karena terjadi monopoli pasar oleh pelaku yang kuat, yakni

menguasai produksi, tenaga kerja, tanah, dan modal sehingga mengabaikan kesejahteraan masyarakat umum yang menjadi tujuan hakiki praksis ekonomi.

Polanyi dan Habermas menulis buku mereka jauh sesudah Aristoteles menulis Etika Nikomakea dan Adam Smith memperkenalkan pemikirannya tentang ekonomi pasar bebas. Etika Nikomakea adalah uraian Aristoteles mengenai etika, yang meliputi 10 buku. Dalam konteks filsafat sebagai ilmu pengetahuan, etika dimasukkan oleh Aristoteles dalam cabang ilmu pengetahuan praktis, termasuk politik dan ekonomi. Dalam pemikiran Yunani, politik mencakup di dalamnya praksis etika dan ekonomi.<sup>1</sup> Negara yang baik mengkondisikan kehidupan warga negara yang baik. Warga negara yang baik berusaha untuk merealisasikan tujuan kodrati hidupnya, kebahagiaan sebagai makhluk rasional. Kebahagiaan individu sebagai makhluk rasional dengan seluruh aspek subjektifnya dimungkinkan oleh ketercakupan individu sebagai anggota masyarakat. Buku I Etika Nikomakea membahas kebaikan sebagai tujuan (*telos*) dari segala sesuatu yang ada. Segala sesuatu berorientasi pada pemenuhan kodratnya, yakni kebaikan.<sup>2</sup> Karena kebahagiaan yang merupakan tujuan kodrati manusia itu hanya dapat diperoleh dalam kehidupan bersama dengan orang lain maka politik disyaratkan dalam pencapaian kesejahteraan ekonomi.<sup>3</sup> Menurut Aristoteles, hanya makhluk rasional mencapai kebahagiaan sebagai pemenuhan kodrat dalam kehidupan sebuah negara (*polis*). Sesudah Aristoteles, semua teori hukum yang di kemudian hari mengambil kodrat manusia sebagai sumber hukum disebut teori hukum kodrat. Sebagai contoh, Smith membahas kodrat manusia sebagai makhluk bersimpati harus menjadi dasar pemikiran mengenai ekonomi. Oleh sebab itu, praksis pasar yang menjunjung tinggi kebebasan tiap-tiap orang bertujuan mencapai kesejahteraan bersama.<sup>4</sup> Polanyi menulis bukunya di awal

krisis ekonomi kapitalis mencapai puncaknya, yang menghasilkan transformasi sosial yang besar namun melenceng dari pendasaran praksis ekonomi tersebut pada moralitas politik yang seharusnya mengkawal perubahan sosial ekonomi. Pada waktu Polanyi menulis bukunya belum banyak ahli ekonomi modern melakukan kritik terhadap kekurangan-kekurangan pandangan ekonomi pasar bebas sebagaimana Habermas yang kritiknya lahir dalam iklim anti kapitalisme yang telah matang terutama dalam aliran teori kritis Mazhab Frankfurt. Polanyi memberi inspirasi pada kritik ekonomi kapitalis oleh pemikir-pemikir sesudahnya seperti Habermas yang mengusung isu yang sama dalam pemikiran-pemikiran kritisnya tentang ekonomi bahwa pasar yang mengatur dirinya sendiri berakhir “brutal” terhadap kebebasan manusia sebagai makhluk sosial.

Pemikiran Polanyi mengenai ketercakupan ekonomi dan masyarakat sejalan dengan pemikiran Habermas mengenai ekonomi dan masyarakat sebagai dua subsistem sosial yang harus dikembangkan secara integratif melalui institusionalisasi aksi komunikatif. Alasan keduanya dapat dirumuskan sebagai berikut. Apabila pasar dibiarkan mengatur dirinya sendiri, hanya dengan tunduk pada imperatif-imperatif ekonomi dan mengabaikan imperatif-imperatif moral, maka proses transformasi sosial yang besar akan menghancurkan hubungan ekonomi dan masyarakat.<sup>5</sup> Pasar yang mengatur dirinya sendiri hanya menghasilkan integrasi sistem moneter tetapi bukan integrasi sosial.<sup>6</sup> Dengan itu, pandangan Polanyi dan Habermas tentang ekonomi tidak hanya mengoreksi salah paham kapitalisme tentang pasar bebas melainkan juga memperbaiki pandangan Marxisme naïf tentang sosialisme ekonomi.

## 2. ELEMEN-ELEMEN STRUKTURAL DALAM THE GREAT TRANSFORMATION

### 2.1. MORALITAS DAN EKONOMI

*The Great Transformation* (GT) secara mendasar dipengaruhi oleh teori etika Aristoteles dan teori ekonomi pasar bebas Adam Smith. Aristoteles menekankan ekonomi sebagai praksis manusia sosial untuk mewujudkan kesejahteraan bersama sebagai *telos* dari politik atau kehidupan bersama.<sup>7</sup> Smith menguraikan rasionalitas pasar bebas sebagai kemampuan manusia mengekspresikan *self-interest*-nya dalam pasar sebagai sebuah iklim yang terkondisi oleh kodrat manusia sosial, kesadaran bersama (*sympathy*) akan perwujudan kesejahteraan masyarakat.<sup>8</sup>

Polanyi mengamini moralitas sebagai aspek substansial dan tujuan dari regulasi politik dalam masyarakat modern yang kompleks agar dapat mewujudkan kesejahteraan bersama. Praksis ekonomi harus dilandasi oleh kesadaran moral yang menghargai kepentingan umum dalam masyarakat yang kompleks.<sup>9</sup> Seperti Aristoteles dan Smith, Polanyi menekankan bahwa kegiatan ekonomi bertujuan mensejahterakan manusia sebagai anggota masyarakat. Baginya, keadilan merupakan substansi ekonomi yang menentukan standar normatif bagi praksis ekonomi untuk mewujudkan tujuan hakiki manusia, yakni kebahagiaan.<sup>10</sup>

Moralitas bersifat rasional karena menyatakan kesadaran manusia sebagai makhluk rasional. Sebaliknya modal tidak menyatakan kesadaran manusia sebagai makhluk rasional. Oleh karena itu, moralitaslah yang harus mengarahkan praksis ekonomi bukan modal yang irasional. Dengan kata lain, apabila manusia hanya mengikuti imperatif-imperatif ekonomi dalam menjalankan

pasar maka apa yang dilakukan manusia tidak lain adalah menuruti dorongan irasional yang bisa menyelewengkan tujuan hakiki pasar, dari distribusi kesejahteraan bersama menjadi akumulasi modal dan pencapaian kesejahteraan pribadi.<sup>11</sup> Oleh sebab itu, pasar tidak boleh mengatur dirinya sendiri melainkan harus diatur berdasarkan norma-norma moral yang membatasi manusia tidak semata-mata sebagai makhluk ekonomi (*homo economicus*) tetapi juga adalah makhluk sosial (*homo socius*). Kritik Polanyi terhadap pasar yang mengatur dirinya sendiri bertujuan mengintegrasikan pasar dan masyarakat atau kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial. Dengan itu Polanyi mengoreksi kapitalisme yang mengeksklusikan manusia semata-mata sebagai makhluk ekonomi di luar habitatnya sebagai makhluk sosial. Polanyi sekaligus menganjurkan kesejahteraan bersama sebagai model dan tujuan ekonomi yang mampu mengatasi sosialisme utopis atau Marxisme ortodoks. Apabila kapitalisme dinilai memisahkan ekonomi dari masyarakat maka Marxisme menyamakan keduanya padahal teori ekonomi yang seimbang harus mencakup ekonomi dan masyarakat. Untuk mewujudkan teori yang seimbang dan praksis pasar yang berorientasi pada penciptaan kesejahteraan bersama maka regulasi yang baik oleh negara akan menentukan praksis ekonomi yang dapat mewujudkan keadilan sosial.<sup>12</sup>

## 2.2. GERAK-GANDA

Pemikiran Polanyi mengenai ketercakupan ekonomi dan moralitas adalah upaya untuk mengintegrasikan formalitas pasar dan keadilan sebagai substansinya. Apa yang dinamakan Polanyi *gerak ganda* adalah pertumbuhan ekonomi yang dikuasai oleh formalisme pasar yang mengatur dirinya sendiri harus diimbangi oleh regulasi sosial yang didasarkan pada substansi moral, ke-

adilan.<sup>13</sup> Menurut Polanyi, kegiatan ekonomi sejatinya adalah tertanam dalam masyarakat. Ketercerabutan ekonomi dari lingkungan sosial mengisolasi pasar dari para pelakunya untuk tunduk pada kehendak moral yang rasional dan menyesuaikan perilaku mereka dengan tuntutan modal yang irasional. Masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang bertindak menurut kehendaknya yang bebas dan rasional kini tidak bebas lagi karena tindakannya diarahkan oleh modal yang sesungguhnya tidak memiliki rasio.

Dengan gagasannya mengenai *gerak ganda*, Polanyi mau menawarkan sebuah alternatif untuk menilai kegiatan ekonomi dan politik sebagai dua sisi yang saling tercakup dan saling menentukan. Hal ini menurut Polanyi penting untuk memberikan arah pembangunan masyarakat modern berdasarkan kerja sama, antara negara, masyarakat, dan pelaku ekonomi, baik pada level lokal maupun internasional. Dalam pemikirannya mengenai *gerak ganda* Polanyi sesungguhnya memperluas pemahaman ekonomi dari sekedar pengetahuan mengenai hukum-hukum pasar (*formalisme pasar*) menjadi pengetahuan mengenai hukum-hukum rasional, yaitu politik ekonomi yang berorientasi kesejahteraan bersama (*substansi ekonomi*). Apabila pemahaman baru ekonomi tersebut dapat tercapai maka hal itu akan membantu redistribusi hasil-hasil pembangunan secara adil (sebagai tugas pemerintah) dan kerja sama dalam pengorganisasian mekanisme kegiatan ekonomi (sebagai peranan masyarakat).

Pemikiran mengenai keadilan sebagai substansi politik ekonomi memperkenalkan seorang Polanyi yang demokratis, sosialis, dan kosmopolit yakni tokoh yang memperjuangkan secara konsisten koeksistensi damai antara masyarakat, negara, dan ekonomi. Untuk mewujudkan politik ekonomi koeksistensi damai itu, Polanyi menganjurkan pelajaran ekonomi yang harus dikem-

bangkan sebagai suatu pendekatan politik ekonomi yang memungkinkan pembangunan relasi ekonomi internasional yang peduli pada hubungan saling bergantung dan saling menentukan antara masyarakat budaya yang majemuk. Politik ekonomi yang berisikan keadilan sebagai substansinya dapat membantu kerja sama internasional untuk melindungi kepentingan umum, baik pada tingkat lokal maupun pada tingkat hubungan internasional. Menurut Polanyi, perdamaian dunia sekarang ini dapat direalisasikan dengan menjadikan keadilan sebagai prioritas ekonomi dan politik.

### 2.3. *PASAR YANG MENGATUR DIRINYA SENDIRI SEBAGAI UTOPIA BRUTAL*

Aristoteles dan Adam Smith adalah dua soko guru ekonomi yang mengajukan moralitas sebagai prinsip rasional dari praksis pasar. Dalam pembahasan etikanya, Aristoteles menunjukkan bahwa politik merupakan kunci pelaksanaan ekonomi yang baik. Dengan kata lain, politik mengkondisikan berfungsinya pasar untuk menghasilkan kesejahteraan sosial. Adam Smith membahas kemakmuran ekonomi perorangan dan negara, dalam *The Wealth of Nations* (1776) dapat tercapai apabila kemakmuran itu didasari oleh perasaan moral, yakni simpati terhadap orang lain sebagaimana ditulisnya dalam *The Theory of Moral Sentiments* (1759). Simpati terhadap kesejahteraan orang lain merupakan panggilan kodrat pada tiap-tiap orang. Kesimpulan dari dua buku tersebut, adalah bahwa pasar bebas tidak dibiarkan berjalan menurut egoisme pelaku ekonomi untuk mengendalikan pasar karena akan merugikan kepentingan umum. Apabila konsep mengenai pasar bebas dipahami sebagai pasar yang mengatur dirinya sendiri tanpa kendali maka praksis pasar tidak hanya

menghasilkan sebuah pemahaman ekonomi yang abstrak tetapi juga pemahaman ekonomi yang utopis dan brutal. Tesis-tesis dasar teori-teori klasik di atas diungkapkan secara eksplisit oleh Polanyi yang membahas hubungan antara moralitas dan hukum sebagai substansi teori ekonomi yang memberi otoritas kepada negara untuk mengatur kepentingan umum dalam praktik ekonomi, sehingga tidak terjadi *chaos* yang membahayakan sosialitas dalam Abad XIX.<sup>14</sup> Menurut Polanyi, apabila benar bahwa pasar merupakan sistem yang mengatur dirinya sendiri tanpa kendali maka seluruh tesis ekonomi pasar bebas yang diletakkan Adam Smith untuk mewujudkan tatanan sosial sebuah masyarakat yang bersahabat (*a friendly society*) runtuh. Secara lebih eksplisit Polanyi mengatakan bahwa kontrol masyarakat atas ekonomi modern tidak hanya dibiarkan menjadi tanggung jawab hati nurani pribadi, masyarakat, atau negara melainkan secara konkret harus menjadi sebuah regulasi yang mengandaikan berfungsinya sebuah otoritas yang memiliki legitimasi moral dan politis. Di sini hukum ekonomi menjadi penting karena harus merefleksikan moralitas masyarakat supaya dapat menuntun kegiatan ekonomi sebagai kegiatan yang berwatak sosial dan konkret bagi perkuatan civitas atau negara. Melalui regulasi yang baik maka dialektika sistem demokrasi dapat menghasilkan cara pandang ekonomi secara baru, khususnya sebuah sistem yang mumpuni untuk menghubungkan alam, masyarakat, dan individu. Keyakinan inilah yang mendorong Polanyi bersikukuh menolak pemikiran tentang pasar yang mengatur dirinya sendiri akan mencerabutkan manusia dari akar sosialnya dan mengubah lingkungan sosial menjadi suatu lingkungan yang tak bersahabat. Apabila peran yang diharapkan dari pemerintah tidak berjalan maka menurut Polanyi masyarakat harus mengambil langkah-langkah yang penting untuk melindungi dirinya meskipun

langkah-langkah tersebut mungkin memperlemah sistem pasar dan atas cara yang lain dapat membahayakan masyarakat. Keberanian masyarakat untuk mengubah sistem pasar yang tidak sesuai kodrat sosial manusia merupakan keharusan yang dibenarkan secara rasional untuk menyelamatkan kepunahan sosialitas sebagai ciri hakiki kegiatan ekonomi.<sup>15</sup> Menurut Polanyi, apabila praksis ekonomi berlangsung dalam pasar tanpa kontrol sosial yang baik maka ekonomi akan menjadi monster sosial yang melumat bahasa sebagai perekat ikatan sosial antara manusia dan menggantikannya dengan uang yang mengintegrasikan segala sesuatu melalui sebuah sistem yang semata-mata mekanis. Proses sejarah yang melahirkan ketercerabutan ekonomi dari lingkungan sosial manusia inilah yang sesungguhnya dimaksudkan Polanyi sebagai perubahan luar biasa dari hubungan-hubungan tradisional dan menjadikan hubungan-hubungan yang sama sekali baru di era modern.<sup>16</sup>

#### **2.4. *EKONOMI PASAR SEBAGAI SISTEM TOTAL ADALAH FETISISME***

Modal pada dirinya sendiri adalah alat atau sarana maka tidak lebih dari sebuah entitas irasional. Akan tetapi di era modern yang ditentukan oleh kapitalisme, modal menentukan perilaku manusia menurut hukum-hukumnya sendiri. Kapitalisme menciptakan sistem ekonomi pasar yang mengatur dirinya sendiri sehingga perilaku manusia tidak lagi ditentukan oleh kehendaknya yang bebas melainkan oleh uang. Perubahan perilaku yang didasari oleh kesadaran menjadi perilaku irasional. Mengikuti pemikiran Marx, Polanyi mengakui bahwa berhala baru dalam masyarakat modern dilukiskan Marx sebagai penyembahan terhadap uang yang dibawakan oleh iklim kapitalisme. Kegiatan ekonomi mendapat nilai peyoratif sebagai sebuah proses penghapusan nilai

komunitarian terutama dengan sirnanya sumber-sumber komunal yang diakibatkan oleh penyembahan terhadap uang. Ekonomi akhirnya menjadi sebuah sistem total yang melalui mekanisme pasar global yang melibas nilai-nilai sosial dari ikatan-ikatan tradisional.<sup>17</sup> Fetisisme komoditas dan uang berlaku sejak awal revolusi industri hingga menjadi puncaknya melalui transformasi sosial yang luar biasa pada Abad XIX.

## 2.5. *KONSEKUNSI-KONSEKUENSI PASAR YANG MENGATUR DIRINYA SENDIRI*

Analisis Alvater, et al. atas pemikiran ekonomi Polanyi yang tercerabut dari masyarakat diuraikan dalam tiga tahap sebagai berikut:<sup>18</sup> Awalnya, alam, masyarakat, dan individu adalah satu kesatuan yang membentuk dunia kehidupan sosial dan moralitas. Pemisahan ekonomi dari masyarakat melalui praksis ekonomi kapitalis mula-mula dilukiskan oleh Polanyi sebagai ketercerabutan tahap 1 yang akhirnya mempengaruhi sistem politik, yakni ketercerabutan negara dari masyarakat. Intensitas ketercerabutan tersebut meningkat menjadi ketercerabutan tahap 2, yang terjadi ketika ekonomi kaum borjuis memasuki tahap sejarah dunia, warga negara lahir dalam sejarah peradaban modernitas Eropa, sebagai anggota sebuah negara-bangsa, yakni negara hukum (*Rechtsstaat*). Ketercerabutan ekonomi dari masyarakat pada tahap ini menghasilkan medium baru, yakni uang menghubungkan ekonomi dengan masyarakat. Bahasa sehari-hari yang tadinya memainkan peran sebagai media tidak lagi memainkan peran tersebut untuk menghasilkan kohesi sosial melainkan uang menghasilkan proses transaksi pasar yang “dingin”. Kesatuan masyarakat yang dihasilkan oleh sistem pasar tersebut bukan lagi hadiah dan kebaikan hati melainkan ter-

jadi sebagai akibat transaksi “pembayaran/nonpembayaran”. Ketercerabutan tahap 3 adalah intitusionalisasi sistem sosial yang didasarkan pada keahlian (*expert systems*), yang tidak hanya menentukan negara tetapi juga mempengaruhi ketercerabutan total ekonomi dari masyarakat. Sistem sosial yang didasarkan pada keahlian ini menghasilkan institusi-institusi yang dijalankan berdasarkan penguasaan teknis atas sebuah profesi yang dalam kenyataan mengontrol hampir seluruh ranah kehidupan manusia sehari-hari. Institusi-institusi tersebut adalah pengarang, arsitek, dokter, dan lain-lain. Kelompok-kelompok profesional ini merupakan fungsionaris yang bertanggung jawab atas risiko sosial menurut keahliannya masing-masing. Kelompok-kelompok ini memiliki peran yang menentukan untuk menciptakan stabilitas sosial karena anggota-anggota yang professional melalui keahlian yang mereka miliki ikut menentukan ketercerabutan hubungan sosial yang sebelumnya bersifat spontan.

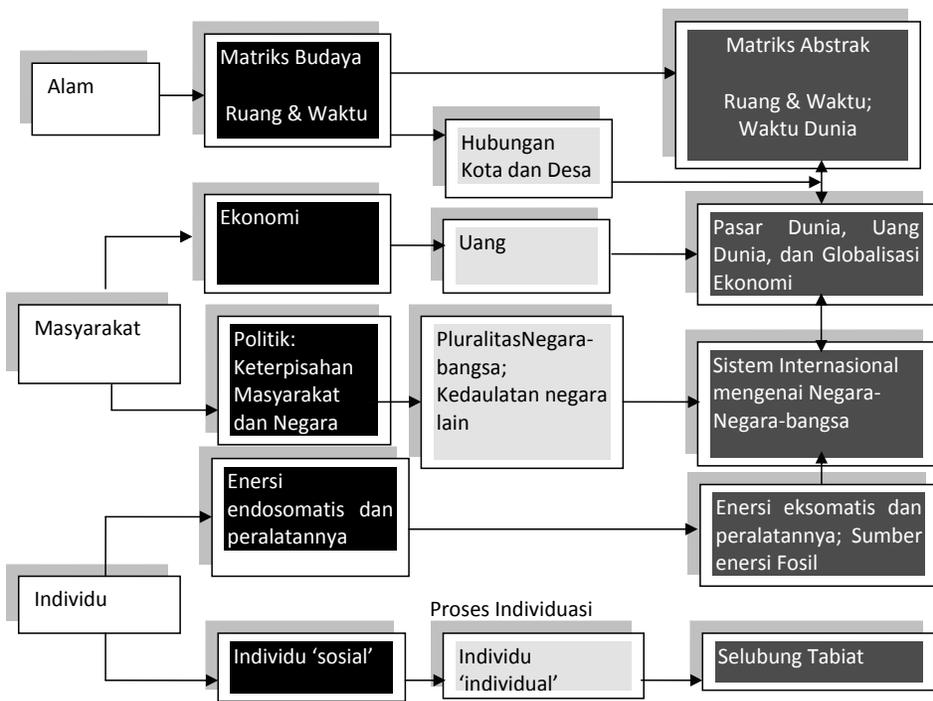
Analisis Alvater sampai pada kesimpulan bahwa kita yang hidup dalam sebuah dunia yang secara spesifik didominasi oleh sistem rasionalitas harus memandang tendensi ketercerabutan sebagai kenyataan yang perlu disikapi secara rasional. Secara khusus dengan mengutip bahasa paradoks M. Weber, Alvater mengatakan bahwa dalam dunia ekonomi modern yang tercerabut dari akal sosialnya harus dihadapi dengan strategi yang disebut Weber *the ‘disenchanted world’ acquires a new enchantment*. Artinya, rasionalitas harus menjadi bemperebudaya untuk menghadapi kekuatan-kekuatan yang mengancam dan mencabut ekonomi dari masyarakat.<sup>19</sup> Dengan kata lain, mekanisme ketercerabutan harus dilihat sebagai peluang untuk meningkatkan partisipasi politik melalui kritik terhadap ekonomi, pasar, dan uang. Lebih jauh, analisis Alvater terhadap kritik ekonomi Polanyi atas pasar yang mengatur dirinya sendiri diperluas dengan

menunjukkan sejumlah contoh untuk menggambarkan dahsyatnya pemisahan ekonomi dari masyarakat sebagai berikut.

#### A. RUANG DAN WAKTU SEBAGAI REZIM EKONOMI BARU

Hal penting lain dalam pemikiran ekonomi Polanyi adalah kajian ke-luasan ruang dan percepatan waktu yang menciutkan dunia. Penyempitan ru-ang dan peningkat waktu terjadi sebagai akibat ketercerabutan ekonomi dari masyarakat. Alwater memperlihatkan bahwa pemikiran Fraser (1993) tentang hal ini membantu kita untuk memahami teori ekonomi Polanyi. Menurut Al-water, Polanyi melihat bahwa dalam ketercerabutan ekonomi secara total dari masyarakat akan mengubah cara pandang manusia tentang ruang dan waktu. Konsep ruang yang dalam masyarakat agraris dikuasai oleh kemampuan indus-tri berskala lokal serta konsep masyarakat agraris itu tentang waktu yang mengi-kuti siklus panen berubah secara mendasar. Di alam modern yang ditandai oleh transformasi sosial yang luar biasa telah menghasilkan konsep ruang yang diper-sempit maknanya oleh industri berskala luas dengan tingkat sirkulasinya dimu-dahkan oleh modal besar untuk mendekatkan jarak melalui sistem moneter yang terglobalisasi. Sama halnya tentang sistem kredit dengan penjadualannya yang ketat menentukan ritme waktu global. Dengan cara ini, logika uang men-dominasi masyarakat dunia. Konsep ruang dan waktu dunia menyusup dalam budaya lokal dan menghasilkan keserentakan pengalaman mengenai ruang dan waktu lokal dengan ruang dan waktu dunia. Dalam rangka globalisasi itu, bu-daya dunia melebur menjadi satu budaya hibrida yang unsur-unsurnya meliputi dan sekaligus menentukan masing-masing budaya lokal. Dalam analisisnya, Alwater memanfaatkan pengamatan Milton Santos (1994) yang mengutarakan bahwa dalam rezim ruang dan waktu dunia itu, manusia menata keseharian-

nya menurut konsep ruang dan waktu yang banal (*banal space and banal time*). Manusia seakan dipaksa hidup dalam lingkungan dan irama yang ditentukan oleh ruang dan waktu global tersebut. Banalisasi ruang dan waktu kehidupan manusia yang demikian itu tidak terlepas dari mekanisme ekonomi yang tercerabut dari masyarakat. Dengan kata lain, tidak ada lagi waktu historis bagi manusia karena irama kehidupannya dikuasai oleh kekinian ruang dan waktu dunia yang titik koordinatnya ditentukan oleh ekonomi bukan oleh rasio.<sup>20</sup> Dalam situasi itu, proses politik dipaksa dalam pengambilan keputusan bukan berdasarkan ruang dan waktu konkret melainkan berdasarkan konsep ruang



Figur 1: Mekanisme Ketercerabutan

Keterangan:  Alam, masyarakat, individu  Ketercerabutan tahap 1  
 Ketercerabutan tahap 2  Ketercerabutan global

dan waktu dunia yang abstrak dan intoleran dalam memaksakan keputusan yang harus segera dibuat.

B. PEMANFAATAN BERLEBIH SUMBER ENERGI FOSIL

Dalam ekonomi kapitalis yang mengglobal itu, sumber energi biotik dialihkan menjadi energi fosil. Energi endosomatik seperti penggunaan tenaga air dan angin dianggap lamban dan sulit untuk mendukung perluasan horizon ekonomi kapitalis. Hanya sesudah peralihan penggunaan sumber energi dari yang bersifat endosomatik kepada penggunaan energi exosomatik (di atas semua bahan bakar fosil) secara luas sejak Abad XVIII berhasil maka kemampuan manusia untuk menguasai ruang dan waktu menjadi lebih besar. Penggunaan energi fosil mempercepat penciptaan rezim waktu modern dan ruang dapat dieksplorasi lebih jauh dengan menggunakan sarana transportasi dan komunikasi yang sedemikian rupa sehingga menjadikan dunia sebuah kampung raksasa yang bisa diakses seketika. Hal ini tidak pernah dibayangkan sebelumnya dalam sejarah umat manusia. Perlu disadari bahwa, dalam kaitan dengan penggunaan energi fosil, pasar berkembang pesat menghasilkan surplus perdagangan yang sebelumnya tidak pernah ada. Kedigdayaan pasar memberi pengalaman yang berguna bagi manusia untuk memperdalam pengetahuannya mengenai energi fosil sebagai penggerak perputaran roda perekonomian kapitalis. Akibatnya ketercerabutan ekonomi dalam era energi fosil menjadi semakin luas dengan pelbagai problem etis di dalamnya. Kendati penggunaan berlebihan energi fosil tidak hanya mencabut ekonomi dari masyarakat melainkan juga merupakan ketercerabutan generasi kini dengan generasi yang akan datang apabila pemanfaatan sumber energi yang tidak dapat didaur ulang tidak disertai dengan tanggungjawab yang memadai. Singkatnya, dunia seakan sudah terbuka lebar

bagi siapa pun untuk melakukan pertualangan yang semakin mudah ke seluruh pelosok bumi.<sup>21</sup>

### C. *BERUBAHNYA FUNGSI UANG*

Dahsyatnya transformasi sosial mengkondisikan pemahaman akan uang secara baru, dari alat tukar untuk mendapatkan komoditas menjadi komoditas itu sendiri, bahkan uang sudah menggantikan tujuan hidup manusia. Situasi ini semakin memperburuk hubungan ekonomi dan masyarakat. Hubungan desa-kota, masyarakat-negara, negara dengan negara, dan individu dengan individu telah mengalihkan fungsi bahasa secara perlahan dan menggantikan dengan uang sebagaimana digambarkan tahap 1 dan tahap 2 dan ketercerabutan pada tahap 2 dan tahap 3 dan seterusnya. Fungsi uang berkembang bersamaan dengan apa yang menjadi akibatnya, yakni pemisahan ekonomi dan masyarakat. Uang semakin lama meninggalkan fungsi tradisionalnya sebagai alat tukar dan menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Pasar menjadi transaksi atau sistem yang mengatur keuangan, pasar uang. Hal ini sudah dibicarakan Marx bahwa dalam pasar kapitalis uang merupakan komoditas atau tujuan transaksi itu sendiri maka uang menjadi berhala manusia modern. Pengalaman ketercerabutan ini terjadi pada tahap 2 di mana kita menghadap suatu sistem ekonomi abstrak yang dikira memungkinkan manusia mengakumulasi kesejahteraannya tetapi pada kenyataannya justru menjadikan manusia rasional budak dari berhala terhadap sebuah kenyataan irasional. Altvater menyimpulkan analisisnya terhadap pemikiran ekonomi Polanyi sebagai berikut:

**Pertama**, uang dan energi fosil memungkinkan transformasi sosial yang besar, yakni mengangkat masyarakat dari tataran lokal menjadi global. Dengan ini, untuk pertama kalinya, globalisasi dipahami lebih dari sekedar pengem-

baran individual dalam menemukan tempat baru atau secara historis sejarah penaklukan tempat baru. Lebih dari yang dikatakan di atas, terjadi suatu sistem finansial global sebagai ranah moneter yang lepas dari ekonomi riil. Akibatnya, ranah ekonomi menjadi kenyataan global sebaliknya ranah politik terikat dengan kewilayahan tertentu saja. Dengan kata lain, ranah politik lebih bersifat nasional meskipun kita mengenal adanya ranah politik internasional. Oleh sebab itu, tesis mengenai pemisahan ekonomi dari politik menjadi relevan untuk dibicarakan oleh negara-bangsa-negara-bangsa dalam pengaturan hubungan pasar dan ekonomi karena dampaknya bagi kedaulatan negara-bangsa. **Kedua**, sistem ekonomi kapitalis bergantung pada pasar uang yang mengarahkan pasar komoditas dan pasar tenaga kerja. Hal ini sesuai dengan teori ekonomi Keynes yang mengatakan bahwa ekonomi uanglah yang menerjemahkan hukum-hukum perkembangan sosial. Dengan uang, jarak antar manusia dalam ruang dan waktu menjadi mungkin untuk diatur sebagai sebuah sistem. Terpisahnya uang dari ekonomi riil memperkuat pasar yang mengatur dirinya sendiri, yang pada gilirannya memaksa masyarakat untuk mengikutinya sebagai '*Sachzwange*' (*inherent necessity/factual constrain*). Ketidakmampuan mengontrol tendensi ekonomi ini dapat memukul balik perencanaan para pelaku pasar apabila, perkembangan uang sebagai uang berhasil hanya jika materi dan energi bisa melepaskan ruang dan waktu dari pengaruhnya yang langsung pada kehidupan dunia sehari-hari. Hanya dengan demikian uang dapat tampil sebagai satu-satunya alat yang tepat dan jenius – tidak hanya untuk menghubungkan ruang dan waktu yang berbeda melainkan mengantarai kepentingan yang berbeda melalui arbitrase yang mengkoordinasikan ruang dan waktu.<sup>22</sup> Jadi pengaturan pasar uang pun tetap perlu dan harus dilakukan untuk menegakkan peran manusia

sebagai tuan atas uang sebagai alat tukar yang mempermudah pencapaian kesejahteraan bersama.

#### D. *PERAN NEGARA*

Pandangan Polanyi terhadap pasar bebas menunjukkan bahwa perkembangan masyarakat menuju masyarakat pasar merupakan sebuah fenomena yang disadari atau tidak harus direncanakan oleh negara sebagai pelaku utamanya. Menurut Polanyi masyarakat pasar bebas tidak terjadi secara otomatis melainkan disengaja oleh sebuah institusi yang berkuasa, yakni negara sebagaimana terjadi dalam Abad XIX. Sebaliknya, perlawanan terhadap sistem ekonomi pasar yang mengatur dirinya sendiri terjadi secara spontan dan tanpa direncanakan, yang datang dari semua sektor karena tidak puas dengan sistem yang ada. Dalam analisisnya terhadap teori ekonomi Polanyi, Daniel Brook mengatakan bahwa Polanyi membenarkan bahwa alasan untuk melawan sebuah sistem pasar yang diklaim mengatur dirinya sendiri adalah kepentingan atau kesejahteraan umum, yang mencakup semua pemangku kepentingan. Transformasi sosial yang luar biasa di sepanjang Abad XIX adalah kemajuan ekonomi kapitalis menghasilkan situasi pekerja melawan gangguan para penganggur, kapitalis melawan sistem perbankan, dan petani melawan jatuhnya harga seakan-akan terjadi sebuah situasi perang semua lawan semua (*bellum omnium contra omnes*). Akibatnya, sistem pasar menjadi tidak stabil dan situasi tersebut telah menimbulkan ketakutan akan aksi-aksi sosial melawan ketidakadilan ekonomi kapitalis. Situasi yang melahirkan kerusuhan sosial merupakan alasan rasional untuk mempertimbangkan hubungan ekonomi yang tercakup dengan masyarakat.<sup>23</sup>

Tuntutan masyarakat atas ketidakpastian ekonomi dan depresi pasar memberi banyak tekanan pada negara untuk bereaksi melalui intervensi, sekurang-kurangnya memberi perlindungan. Lebih penting lagi, negara harus mengurai krisis ekonomi dan melakukan reformasi secara menyeluruh bagi bentuk baru ekonomi negara. Dalam hal ini, karya Alan Wolfe yang berjudul *The Limits of Legitimacy: Political Contradiction of Contemporary Capitalism* (1977) dapat dirujuk karena buku itu berbicara tentang bagaimana negara memanfaatkan bentuk ekonomi baru sebagai jalan keluar untuk memperbaiki dan mengatasi krisis kapitalisme. Wolfe menjelaskan bahwa negara (sistem politik) liberal yang menerapkan sistem ekonomi kapitalistik menekankan bahwa ada demokrasi merupakan keharusan yang memungkinkan krisis bisa dibicarakan dan diatasi bersama melalui alasan-alasan yang diterima oleh semua lapisan masyarakat. Berhadapan dengan tuntutan demokrasi yang terus berkembang, yakni tuntutan masyarakat akan partisipasi politik maka kapitalisme akan bereaksi mempertahankan diri dan berupaya menunda pengintegrasian kapitalisme dan demokrasi. Dalam sistem politik liberal itu, Wolfe mengatakan bahwa negara harus mengevaluasi atas evolusi politik ekonomi kapitalistik untuk memastikan bahwa kapitalisme dapat dipertahankan melalui sistem politik yang demokratis. Andaiian evaluasi itu dilakukan harus dipahami bahwa kebebasan ekonomi hanya sebagian dari solusi, sebagiannya lagi adalah kebebasan politik, keduanya harus menjadi komitmen kelas sosial yang berkuasa untuk mendorong perubahan ke arah yang lebih baik. Analisis Wolfe bertujuan mengkondisikan kompromi yang secara rasional harus dilakukan antara pelaku pasar dan masyarakat yang bisa terwujud dalam sistem hukum yang adil. Wolfe mau menunjukkan bahwa kegelisahan Polanyi melihat kebrutalan sistem pasar atas

masyarakat sebagai sesuatu yang tak terhindarkan maka solusinya tidak lain adalah menundukkan kapitalisme dari kesombongan diri melalui institusionalisasi hukum yang memihak keadilan sosial. Hal ini tidak terjadi menurut logika hukum teleologis melainkan harus dikerjakan secara terencana sebagai keputusan untuk melakukan perubahan. Daripada mengsubordinasikan kemauan masyarakat pada pasar maka pasarlah yang harus ditundukkan kemauannya sesuai keinginan masyarakat. Pasar harus ditransformasikan dalam bentuk sebuah piranti yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Reformasi pasar yang demikian sesuai dengan pemikiran Polanyi yang mengingatkan bahwa “jika industrialisme tidak untuk menyingkirkan bangsa manusia maka apa yang harus dilakukan terhadap pasar adalah menundukkan pasar yang kapitalistik kepada tuntutan kodrat manusia”. Keyakinan Polanyi ialah organisasi ekonomi modern tidak bertentangan dengan kecenderungan natural manusia untuk mewujudkan kesejahteraan maka gagasan mengenai ketercakupan ekonomi dengan sosialitas manusia hanya dapat hidup dalam masyarakat sosialis. Lebih jauh Polanyi menjelaskan bahwa sosialisme merupakan kecenderungan yang bersifat inheren dalam sebuah masyarakat industrialis. Jadi, untuk mengatasi pasar sebagai sistem yang mengatur dirinya sendiri negara harus merumuskan hukum bagi praksis ekonomi sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial.<sup>24</sup> Pengakuan terhadap Polanyi sebagai seorang pemikir ekonomi sosialis dapat diketahui dari analisis Daniel Bell dalam bukunya *The Cultural Contradictions of Capitalism* (1976). Dalam buku ini, Bell mengakui bahwa Polanyi adalah seorang sosialis di bidang ekonomi dan seorang liberal dalam politik. Kendati pemikiran politik ekonomi Polanyi bersifat sosialis-liberal, pandangannya tidak bermaksud memanjakan masyarakat

untuk menerima saja hasil-hasil ekonomi melainkan mendorong masyarakat untuk secara energetik terlibat dalam praksis pasar dengan kebebasan individu. De-komodifikasi komoditas fiktif, yaitu modal, yang memperlakukan manusia sebagai obyek adalah syarat emansipasi masyarakat dalam pasar yang berjalan menurut kehendak bebas manusia. Hal ini sesungguhnya menjadi kesimpulan Polanyi dalam bukunya *The Great Transformation* bahwa kebebasan politik dan ekonomi tercakup satu sama lain dan oleh Polanyi disebut syarat minimum yang harus ada agar semua orang berpeluang menjadi warga negara yang penuh dalam melakukan partisipasi sosial. Polanyi menegaskan bahwa setiap usaha untuk mempersatukan masyarakat dan ekonomi harus disertai dengan usaha untuk mengembangkan kebebasan dan rencana yang meliputi perkuatan hak-hak individu dalam masyarakat. Kuatnya keyakinan Polanyi tersebut dipengaruhi oleh pemahamannya mengenai negara sebagai sumber kekuasaan sejauh memenuhi syarat rasional di atas. Dalam hubungan itu, Polanyi menilai bahwa kelemahan liberalisme dan Marxisme sesungguhnya sama, yakni keduanya tidak percaya pada negara. Liberalisme ngotot untuk kesejahteraan individu dan Marxisme untuk kesejahteraan masyarakat. Keduanya melalkan peran negara dalam regulasi hukum yang adil sehingga teori ekonomi keduanya bersifat abstrak. Pemikiran Polanyi tentang ketercukupan ekonomi dan masyarakat dimungkinkan oleh sebuah peran pemerintah yang independen dalam merumuskan hukum pasar yang berorientasi pada kesejahteraan bersama. Menurut Polanyi, konsep liberalisme mengenai pasar bebas atau Marxisme ortodoks mengenai ekonomi terpimpin tidak berhasil menciptakan kebebasan dalam ranah politik dan ekonomi. Dalam sistem ekonomi internasional, esensi ekonomi yang didasarkan pada standar emas sudah digantikan oleh yang lain,

yang lebih modern, termasuk Dollar Amerika Serikat sesudah perang Dunia II. Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara yang kuat secara ekonomi sesudah perang, terutama sesudah kebijakan mengembangkan nilai tukar Dollar pada tahun 1973 (ketika standar emas ditiadakan). Sekarang ini, standar nilai tukar mata uang bukan lagi standar nilai tukar emas melainkan mekanisme yang memungkinkan transmisi tekanan politik dan ekonomi dari satu negara ke negara yang lain. Dengan kata lain, masyarakat pasar tidak seluruhnya jatuh. Perang kronis antara kapitalisme dan demokrasi tidak bisa dihilangkan. Sementara para kapitalis berjuang mengembangkan dan mempertahankan kekuasaan mereka atas masyarakat, masyarakat bertahan dan memperjuangkan kehendak mereka sebagai kehendak umum untuk berkarya. Sampai di titik ini, dunia masih menunggu, apakah teori ekonomi Polanyi dapat menciptakan sebuah masyarakat internasional yang bebas dari tirani pasar dan kediktatoran elit politik?<sup>25</sup> Habermas dalam karyanya mengenai *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry Into Category of Bourgeois Society* (1989) menyoroti isu yang sama bahwa keadilan sosial tercipta di ruang publik, apabila ada proses dalam sistem politik yang demokratis yang mengaitkan subsistem ekonomi dan subsistem masyarakat dalam sebuah proses yang secara deliberatif berorientasi pada pencapaian kesepakatan bersama.<sup>26</sup>

### 3. ELEMEN-ELEMEN STRUKTURAL DALAM RUANG PUBLIK

Pemikiran Habermas mengenai perubahan politik dan ekonomi dalam ranah publik masyarakat borjuis dalam Abad XVIII dinaminya sebagai sebuah transformasi struktural karena perubahan itu telah mempengaruhi secara mendasar konsep mengenai ruang publik yang sebelumnya terikat dengan sebuah tempat dalam sebuah rumah tangga, ketika para anggotanya berkumpul untuk

membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kerja atau proses produksi.<sup>27</sup> Bukunya yang berjudul *Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society* (1989) merupakan analisis kritis tentang penjelmaan makna dan peran ruang publik yang baru dan seharusnya, yakni sebuah sistem demokrasi atau negara hukum. Pertanyaan mengenai sistem demokrasi merupakan inti dari teori Habermas tentang perubahan struktural sebuah negara hukum dalam perkembangan kapitalisme lanjut.

Pada bagian ini, saya coba melihat bagaimana pandangan Habermas mengenai hubungan antara hukum dan moralitas dapat digunakan untuk mendefinisikan hubungan baru antara subsistem ekonomi dan subsistem masyarakat dalam ruang publik politik yang lebih demokratis vis-à-vis teori Polanyi tentang ketercakupan ekonomi dan masyarakat dalam sebuah sistem hukum yang lebih adil untuk mengendalikan pasar bagi kesejahteraan umum.

### 3.1. *HUKUM REFLEKTIF DAN MORALITAS DUNIA KEHIDUPAN*

Hukum adalah institusionalisasi nilai-nilai yang merefleksikan moralitas manusia dalam dunia kehidupan sehari-hari. Sebagai nilai-nilai dunia kehidupan, moralitas menyatakan apa yang sesungguhnya “selalu sudah ada” (*immanens*) dan mendasari interaksi sosial melalui penggunaan bahasa sehari-hari. Jadi, menurut Habermas, moralitas merupakan elemen struktural dunia kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, transformasi struktural yang dikaitkan dengan hukum dalam ruang publik politik tidak lain adalah perubahan cara pandang manusia tentang moralitas dalam dunia kehidupan sehari-hari.<sup>28</sup>

Menurut Habermas, konsep hukum sebagai norma sosial yang mengikat secara publik harus merefleksikan moralitas yang selalu sudah ada di dunia ke-

hidupan manusia sehari-hari. Alasannya, moralitas merefleksikan nilai yang diterima berdasarkan pemahaman bersama anggota masyarakat dan menentukan bagaimana mereka berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Moralitas yang menyatakan kesadaran intersubjektif itu, menurut Habermas, harus menjadi model institusionalisasi hukum sebagai norma sosial.

Pemikiran Habermas mengenai hubungan antara moralitas yang komunikatif dan hukum yang merefleksikan moralitas semacam itu menyatakan bahwa kebebasan dan hukum menurut hakikatnya bersifat *co-original* atau *equiprimordial*<sup>29</sup> dalam arti ada bersama dari awal, satu mengandaikan yang lain. Oleh sebab itu, berlakunya klaim hukum membutuhkan pembenaran secara moral untuk menjamin kebebasan tiap-tiap orang. Sebaliknya, moralitas memerlukan sistem hukum atau perundang-undangan untuk menjaga kebersamaan sosial. Hubungan antara moralitas dan hukum dalam pandangan Habermas ditentukan oleh *Sollgeltung Prinzip*. Artinya, suatu keharusan (kewajiban) yang mengikat hanya bisa dibenarkan jika kewajiban itu sesuai dengan nilai atau norma moral.<sup>30</sup>

Tuntutan hukum dan pendasarannya pada moralitas, bagi Habermas, menyatakan dua aspek dari realitas sosial yang satu dan sama, yakni manusia sebagai kesatuan hak dan kewajiban. Hak merupakan klaim yang sah dan dibenarkan secara rasional sebagai tuntutan seorang atas apa yang menjadi jati dirinya, yakni kehendaknya yang bebas. Sebaliknya, kewajiban merupakan tanggungjawab individu untuk menghormati apa yang menjadi hak orang lain. Inilah konsep hukum deontologis yang didasarkan pada kehendak bebas sebagai moralitas universal. Habermas mengembangkan pemikiran hukum deontologis I. Kant bahwa hak-hak individu harus menjadi dasar hukum positif

yang berlaku umum. Sebab, apa yang saya tuntut sebagai hak saya harus berlaku sama bagi siapa pun yang mengklaim hal yang serupa apabila yang bersangkutan berada dalam posisi yang sama. Dengan demikian hak dan kewajiban atau moralitas dan hukum merupakan dua sisi dari kenyataan yang sama.<sup>31</sup> Berdasarkan konsep hukum deontologis ini, Habermas mengembangkan pemikiran bahwa individualitas manusia dengan seluruh dimensi subyektifnya hanya bisa berkembang dalam sebuah konteks sosial. Sebaliknya sosialitas manusia hanya bisa terwujud melalui hubungan intersubjektif. Itulah sebabnya, hukum harus dirumuskan berdasarkan kesepakatan umum supaya tuntutan bahwa kewajiban hukum yang memaksa (*ligat*) tanpa kecuali tidak merusak martabat manusia sebagai subyek rasional dan berkehendak bebas.

### 3.2. *RUANG PUBLIK, PASAR BEBAS, DAN DEMOKRASI DELIBERATIF*

Konsep ruang publik, pasar bebas, dan demokrasi deliberatif merupakan pokok-pokok analisis Habermas tentang transformasi struktural dalam negara hukum di era kapitalisme lanjut. Transformasi ruang publik masyarakat borjuis di akhir Abad XVII–XVIII menimbulkan krisis legitimasi di ruang publik politik yang dikuasai negara di akhir Abad XIX. Krisis yang paling mencolok adalah krisis ekonomi dalam negara di era kapitalisme lanjut (*advanced capitalist society*). Bagi Habermas, krisis yang dihadapi masyarakat modern di era kapitalisme maju tersebut harus disiasati dengan rencana, koordinasi, dan hukum yang tujuannya adalah melanjutkan apa yang tidak dapat dihentikan, yakni modernisme. Dalam kapitalisme lanjut, dikotomi kelas dalam bahasa Marxis menjadi tidak relevan karena masyarakat sebagai pekerja tidak berhadapan langsung dengan pengusaha yang lazimnya terdapat dalam kapitalisme awal

atau liberalisme klasik. Di sana, kapitalisme dipahami sebagai *private capitalism* (kapitalisme yang ditentukan oleh kepemilikan modal pribadi/keluarga). Dalam kapitalisme lanjut, sistem regulasi negara mengatur hubungan *tripartite* masyarakat dan pengusaha di satu pihak dengan pemerintah di pihak lain. Dalam situasi yang berubah ini “jualan” Marxisme mengenai persamaan kelas sosial melalui praktik revolusi sudah tidak laku lagi karena masyarakat warga negara berhadapan dengan negara sebagai sebuah sistem kekuasaan yang mengendalikan hubungan-hubungan sosial, politik, dan ekonomi di masyarakat.

Untuk menjelaskan posisi negara yang kuat dalam era kapitalisme lanjut di Abad XIX-XX, Habermas bertolak dari pandangan F.G.W. Hegel mengenai negara hukum (*Rechtsstaat*) dan masyarakat warga negara/*civil society* (*bürgerliche Gesellschaft*) yang dikaitkan dengan konsep ruang publik (*Öffentlichkeit*). Ada lima konsep ruang publik yang harus dipahami untuk mengerti pemikiran Habermas mengenai pasar bebas dan demokrasi deliberatif.<sup>32</sup> *Pertama*, ruang publik privat atau *Intimsphäre* yakni ruang publik yang terbentuk oleh anggota keluarga sebagai manusia privat dalam rumah tangga (keluarga) ketika anggota keluarga ingin membicarakan bersama-sama masalah ekonomi keluarga, khususnya masalah produksi dan kerja sosial. *Kedua*, ruang publik politik atau *politische Öffentlichkeit*, yakni ruang publik yang menjadi urusan aparatus negara dalam pelbagai institusi politik. *Ketiga*, ruang publik kaum cendekia atau *literarische Öffentlichkeit* yang memperjuangkan kepentingan umum melalui karya-karya mereka di masyarakat. *Keempat*, ruang publik perwakilan rakyat atau *repräsentative Öffentlichkeit* yang diartikan sebagai otoritas yang dimiliki oleh orang-orang yang berasal dari golongan sosial yang tinggi dan berperan sebagai representasi kepentingan keluarga-keluarga privat dalam urusan-urusan

mereka di luar rumah tangga. *Kelima*, ruang publik yang mencakup seluruh masyarakat warga negara atau *bürgerliche Öffentlichkeit*, yang terorganisir sebagai jaringan organisasi-organisasi warga negara (*bürgerliche Gesellschaft*) atau *civil society*.

Bagi Habermas, transformasi ruang publik secara radikal terjadi dalam ruang publik masyarakat warga negara karena ruang publik ini mencakup kepentingan ekonomi, politik, dan demokrasi yang harus termediasi dengan baik oleh sebuah sistem hukum yang berlaku sama untuk semua orang sebagai individu, keluarga/komunitas budaya, dan warga negara. Dalam ruang publik ini, subsistem ekonomi dan masyarakat yang sudah terdiferensiasi (*uncoupling*) karena proses rasionalisasi dalam dunia kehidupan sehari-hari harus disatukan kembali (*re-coupling*) berdasarkan sebuah sistem hukum yang terinstitusionalisasi di ruang publik politik berdasarkan kesepakatan yang terjadi di ruang publik masyarakat warga negara. Sistem hukum yang terinstitusionalisasi melalui kesepakatan umum di ranah masyarakat warga negara dapat dituntut untuk berlaku secara publik bagi individu dalam relasi-relasi ekonomi dan sosial kemasyarakatan.

Sistem hukum yang didasarkan pada konsensus memenuhi standar demokrasi deliberatif sehingga mekanisme pasar dan politik tidak akan menempuh jalannya sendiri-sendiri. Bagi Habermas, pasar dan demokrasi bertolak dari prinsip rasional yang sama, yakni pertukaran yang menghargai kebebasan timbal-balik antar partisipan pasar dan politik. Mekanisme pasar terjadi dalam pertukaran komoditas yang dipengaruhi oleh imperatif-imperatif ekonomi. Sebaliknya demokrasi terjadi dalam pertukaran perspektif atau pandangan hidup yang mekanismenya ditentukan oleh imperatif-imperatif politik. Oleh sebab

itu, imperatif ekonomi harus dipersandingkan dengan imperatif politik dalam sebuah prosedur pengujian validitas klaim dari masing-masing sistem apakah klaim masing-masing bisa dibenarkan dan atas dasar apa suatu klaim dapat diterima? Di sinilah pentingnya membangun sistem demokrasi atau negara hukum yang dapat berperan menjembatani kepentingan ekonomi dan politik semata dalam menciptakan integrasi sosial.

Bagi Habermas, baik pasar maupun demokrasi tidak bisa bebas secara absolut. Alasannya, apabila pasar bebas diartikan secara absolut, maka uang akan mengambil alih rasionalitas manusia sebagai media yang menguasai seluruh mekanisme pertukaran komoditas. Alhasil media komunikasi yang menggunakan bahasa sehari-hari akan tergusur oleh penggunaan bahasa ekonomi yang sistemik dalam mengendalikan hubungan-hubungan yang kompleks dan obyektif dalam pasar. Para pelaku pasar secara instrumental dilatih untuk menguasai jargon-jargon ekonomi agar bisa mengakumulasi keuntungan ekonomi yang membesar kekuasaan mereka melakukan manipulasi dan monopoli pasar. Mengikuti pemikiran K. Marx, uang yang sesungguhnya hanya menjadi alat tukar di dalam pasar yang mengatur dirinya sendiri akan memainkan peran sebagai pengendali (*steering media*) utama perilaku manusia dalam pasar. Uang, kata Marx, tadinya sebuah sarana tanpa akal budi (irasional) kini berada di balik semua perilaku pasar. Dengan kata lain, dalam ekonomi pasar tanpa kendali hukum yang rasional membuat manusia rasional tunduk pada irasionalitas modal. Sebaliknya demokrasi tanpa hukum akan menghasilkan demagog yang atas nama kepentingan umum.

Situasi pasar yang dilukiskan di atas merupakan krisis, karena kontradiksi-kontradiksi di dalamnya menjadi ancaman yang nyata terhadap hakikat

manusia sebagai makhluk sosial. Akan tetapi Habermas melihat kenyataan itu sebagai konsekuensi logis dari transformasi ruang publik dari hubungan intersubjektif dalam dunia kehidupan sehari-hari menjadi ruang publik yang menginstitusionalisasi hubungan-hubungan objektif dalam kehidupan modern. Daripada meratapi perubahan yang mengganggu hubungan-hubungan sosial yang tadinya berjalan secara spontan, Habermas mengajak untuk melihat perubahan itu sebagai peluang (*opportunity*) untuk meningkatkan hubungan-hubungan baru antar individu, individu dan masyarakat, masyarakat dan negara dalam sebuah semangat yang menjunjung tinggi hak-hak pribadi (*Privatrechte*) dalam sebuah sistem demokrasi atau negara hukum (*Rechtsstaat*).<sup>33</sup> Dalam sistem demokrasi atau negara hukum, kebebasan setiap orang dijamin oleh hukum – yang memberi kewenangan kepada negara sebagai instansi publik untuk menggunakan kekuasaan itu menjaga kebebasan pasar dan tanggung jawab sosial.

Pasar bebas tanpa kendali politik menghasilkan kapitalisme sebagai praksis ekonomi yang mengisap rakyat. Negara absolut menghasilkan kekuasaan politik yang represif. Asimetri pasar dan politik dapat dijumpai melalui budaya politik liberal, yakni sistem demokrasi atau negara hukum. Negara hukum dalam budaya politik liberal mementingkan prosedur legislasi perundang-undangan yang didasarkan pada persetujuan masyarakat warga negara. Di sini Habermas mereformulasi negara Hegelian dari pemahamannya sebagai kekuasaan absolut,<sup>34</sup> yakni satu-satunya pembuat hukum dan penyelenggara sistem politik untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat warga negara, menjadi negara hukum yang kekuasaannya dibatasi oleh kehendak umum masyarakat warga negara. Dalam paham demokrasi deliberatif, tugas negara tidak menguasai dan mengatur pemenuhan kebutuhan masyarakat melainkan

membedayakan ekonomi dan masyarakat melalui sistem hukum yang menjaga kebebasan individu dan kewajiban sosial sedemikian rupa sehingga baik ekonomi maupun masyarakat dapat berkembang bersama sebagai dua subsistem sosial yang saling melengkapi dan memperkuat eksistensi negara hukum yang demokratis. Syaratnya adalah institusionalisasi budaya politik liberal dalam bentuk sebuah sistem demokrasi deliberatif.<sup>35</sup> Dalam pandangan Habermas, demokrasi deliberatif tidak bermaksud menafikan krisis sosial yang nyata-nyata mengancam ketercerabutan subsistem ekonomi dari subsistem masyarakat. Sebaliknya, teori tentang demokrasi deliberatif merupakan antisipasi atas krisis itu sebagai sesuatu yang mengancam integrasi sosial namun dapat diatasi apabila sistem demokrasi dikembangkan sebagai sebuah paradigma hukum yang mencakup kepentingan negara, masyarakat, dan ekonomi bersama-sama. Negara tidak bisa berkembang tanpa ekonomi namun negara tidak ada tanpa masyarakat, maka kedua subsistem sosial, ekonomi dan masyarakat, sebagai elemen-elemen struktural dalam ruang publik politik harus dibangun menurut model komunikasi ruang publik masyarakat warga negara.

### 3.3. *SISTEM TOTAL DAN KOLONISASI RUANG PUBLIK*

Pembicaraan Habermas mengenai ruang publik tidak pertama-tama dimaksudkan sebagai sebuah tempat, melainkan sebuah kondisi atau syarat yang memungkinkan suatu relasi sosial dapat diklaim sebagai publik atau memenuhi syarat sebagai publisitas. Realisasi konsep ruang publik yang demikian dapat tercapai di lima ranah ruang publik yang disebutkan di atas. Akan tetapi klaim “publik” sebagai standar legitimasi untuk sebuah tindakan mensyaratkan rasionalitas komunikatif.<sup>36</sup> Oleh sebab itu, klaim ekonomi dan masyarakat

mengenai sesuatu yang dianggap publik mensyaratkan pengujian rasionalitas, apakah prosesnya mengandaikan melibatkan semua pihak yang kepentingannya tercakup dalam sebuah klaim dan bahwa pendapat setiap orang secara terbuka dibicarakan?

Ekonomi dan politik yang berlaku sebagai sebuah sistem total tidak dapat diklaim publik karena apa yang berlangsung sebagai sistem total tidak memenuhi persyaratan klaim publik yang harus didasarkan pada kontestasi argumen oleh semua pihak yang kepentingannya tercakup dalam sistem ekonomi atau politik total. Sebuah sistem ekonomi atau politik yang menguasai cara berpikir dan bertindak tanpa kontestasi argumen merupakan siasat pelaku ekonomi atau politik yang melakukan kolonisasi ruang publik dengan satu cara pandang yang dipaksakan oleh imperatif ekonomi kapitalistik atau imperatif kekuasaan otoriter. Kolonisasi dapat disadari atau tidak disadari tetap mengarahkan pihak lain pada tujuan di luar dirinya sendiri. Apabila ekonomi berkembang menjadi sebuah sistem total maka uang akan menjadi alat menentukan seluruh dimensi kehidupan manusia di tiga wilayah: keluarga, masyarakat, dan negara. Sebaliknya apabila kekuasaan otoriter berkembang menjadi sistem total maka kehendak penguasa menjadi penentu akhir dari dinamika sosial pada pelbagai level, ekonomi, politik, dan hukum. Dengan itu, uang dan kekuasaan tidak hanya diselewengkan fungsinya sebagai sarana yang irasional tetapi juga sebaliknya melecengkan kesadaran pelaku ekonomi atau otoritas politik dari hakikatnya sebagai makhluk rasional karena tindakannya dikendalikan oleh imperatif-imperatif ekonomi dan kekuasaan belaka. Pengkerdilan tujuan ekonomi pada uang dan politik pada kekuasaan merupakan manifestasi rasionalitas instrumental yang pada gilirannya melahirkan konflik horisontal berupa per-

saingan pasar yang tidak sehat atau pengendalian kebebasan mengemukakan pendapat. Secara vertikal, konflik itu akan mengambil bentuk sebagai delegitimasi hukum karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi dan politik yang tidak lagi responsif.

#### 3.4. *OPINI PUBLIK SEBAGAI RASIONALITAS POLITIK EKONOMI BARU*

Budaya politik liberal dimaksudkan sebagai kondisi atau syarat untuk menghargai kebebasan berpendapat. Dalam sistem demokrasi, budaya politik liberal terinstitusionalisasi dalam bentuk negara hukum yang menjamin kebebasan berpendapat sebagai syarat perumusan hukum yang dapat diklaim bersifat publik. Terbentuknya kehendak umum sebagai syarat pembuatan hukum merupakan keharusan yang diyakni Habermas dapat menjembatani kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial di ruang publik politik masyarakat pasca-tradisional dan pascaindustrial.

Budaya politik liberal menolak rezim ekonomi atau rezim politik yang dikendalikan oleh klaim ruang publik yang tidak dikaitkan dengan masyarakat warga negara. Ruang publik politik dalam budaya politik liberal harus mentransformasi kepentingan umum yang terbentuk melalui opini publik di ruang publik masyarakat warga negara sehingga rumusan hukum dalam ruang publik perwakilan rakyat dan pelaksanaannya oleh pemerintah merefleksikan kepentingan ekonomi dan masyarakat warga negara. Dengan menerima kontestasi argumen sebagai etika politik masyarakat pasca industrial maka klaim publik di ranah ekonomi dan masyarakat dapat didorong untuk mempengaruhi proses legislasi di ruang publik politik.<sup>37</sup> Dengan kata lain, hukum mengatur prak-

sis ekonomi dan sosial menurut kehendak masyarakat. Budaya politik liberal melahirkan rezim opini publik sebagai pernyataan rasionalitas politik hukum ekonomi baru.

### 3.5. *KAPITALISME VERSUS MARXISME*

Kapitalisme yang terjadi pada Abad XIX merupakan akibat dari perkembangan ekonomi dalam pasar yang dipersepsi mengatur dirinya sendiri. Kapitalisme didasarkan pada kebebasan individu untuk mengejar keuntungan ekonomi sebesar-besarnya tanpa harus memikirkan tanggung jawab sosial tentang kesejahteraan umum. Kapitalisme tidak memusuhi kesejahteraan umum akan tetapi tidak mengambilnya sebagai logika internal dalam praksis ekonominya. Kesejahteraan umum dibiarkan terjadi sendiri apabila kesejahteraan tiap-tiap orang dapat terpenuhi melalui persaingan pasar bebas. Untuk itu, kapitalisme memahami hubungan masyarakat dan ekonomi dalam dunia kehidupan secara terpisah, masing-masing berjalan menurut hukumnya sendiri. Ekonomi ada di ranah privat sehingga ditabukan dari campur tangan masyarakat atau negara. Pasar menentukan hukum pertukaran komoditas tanpa harus diintervensi oleh kekuatan dari luar karena akan mematikan pasar dan mengekang kebebasan berusaha pelaku ekonomi.

Marxisme sebaliknya memahami ekonomi dan masyarakat dalam dunia kehidupan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Masyarakat adalah pelaku ekonomi yang memproduksi komoditas dalam pasar dan berhak atas hasil-hasil ekonomi. Masyarakat dalam pemikiran Marx adalah kaum pekerja dan ekonomi adalah proses produksi maka yang berhak mengklaim hasil dari kegiatan ekonomi adalah masyarakat.

Kontradiksi di Abad XIX adalah pemisahan yang tajam antara ekonomi yang dikuasai oleh para pemilik modal, yakni kaum kapitalis menguasai alat-alat produksi dan menentukan upah bagi kaum pekerja menurut hubungan-hubungan dalam proses produksi. Kontradiksi ini menimbulkan keprihatinan yang mendalam mengenai ekonomi yang secara klasik dimaksudkan untuk menciptakan kesejahteraan umum telah berubah menjadi pengisapan darah ekonomi oleh kaum kapitalis terhadap para pekerja. Hubungan ekonomi dan masyarakat merosot menjadi dua subsistem sosial yang tidak hanya berbeda melainkan juga bertentangan.

#### 4. PENUTUP

Polanyi dan Habermas mengakui bahwa Abad XVIII merupakan era ruang publik masyarakat borjuis Eropa. Polanyi melihatnya sebagai anteseden perubahan sosial luar biasa dalam Abad XIX yang menimbulkan ketercera-butan ekonomi dari masyarakat. Habermas melihatnya sebagai model pembanguan politik liberal bagi Abad XIX dan sesudahnya. Sebagai penganut pemikiran Hegelian kiri, Polanyi dipengaruhi pemikiran Marxis dalam membaca kejadian Abad XIX sebagai dekonstruksi sosial yang mengakibatkan ekonomi melesat meninggalkan moralitas sosial masyarakat. Habermas menggunakan Marxisme dalam melihat situasi ekonomi Abad XIX dan sesudahnya sebagai produk historis yang tercakup di dalamnya rasionalitas yang mengundang rekonstruksi kreatif. Rasionalitas historis menyatakan aspek keingintahuan manusia sebagai makhluk rasional, yang tidak menyerahkan nasibnya pada reruntuhan, sebaliknya dapat membangun kemegahan masa depan dari puing-puing sejarah yang bisa dibaca dalam kekinian waktu dan tempat yang terjaring dalam sebuah komunikasi dunia global.

Konfigurasi ulang konsep ruang publik melalui teori rasionalitas komunikatif merupakan kontribusi Habermas pada peradaban demokrasi dunia modern.<sup>38</sup> Tak ketinggalan Cina membuka pintunya bagi rasionalitas Barat dalam pemikiran filosofis Habermas dengan melakukan penerjemahan terhadap buku-buku utama Habermas termasuk mencobanya dalam merilis kurikulum pendidikan akademis di negara tirai bambu tersebut.<sup>39</sup> Keberanian untuk mencoba nilai demokrasi yang ditumbuhkan dalam iklim politik borjuis membuktikan bahwa kesalahan dalam kesadaran borjuis, kalau toh ada, tidak lebih buruk dari harapan-harapan rasional meskipun utopis yang ditawarkannya.<sup>40</sup>

Pelajaran ekonomi yang dapat ditarik dari pemikiran Polanyi dan Habermas, khususnya bagi pembangunan demokrasi di negara-negara berkembang adalah anjuran mereka untuk memperkuat peran masyarakat melalui demokrasi deliberatif. Dalam kondisi negara berkembang yang amat besar populasinya dan kaya dalam perspektif budaya multikulturalis, kiranya model demokrasi langsung ala *polis* Yunani menjadi tidak realistis. Pemikiran mereka memperkuat kesadaran akan tanggung jawab sosial pelaku ekonomi terhadap masyarakat dan di alam modernisme partisipasi politik memungkinkan masyarakat mengorganisir dirinya menjadi kekuatan bargaining dalam hal pengambilan keputusan publik, khususnya mengenai pilihan ekonomi dan cara-cara menjalankannya secara transparan. Negara tidak dipahami sebagai pelaku tunggal rasionalitas publik dalam penentuan hukum melainkan partisipasi riil melalui organisasi-organisasi masyarakat merupakan keharusan untuk menempatkan ekonomi di pangkuan sosial seluruh masyarakat sebagai *stakeholder*.<sup>41</sup> Dengan kata lain, masalah ekonomi harus ditaruh di hadapan mata semua pihak sebagai pemangku kepentingan dan sama-sama bertanggung jawab untuk mengubahnya kearah

yang lebih baik.<sup>42</sup> Relevansinya untuk pengamanan lingkungan hidup, gagasan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dapat dibaca sebagai tanggung jawab sosial masyarakat dalam melakukan pengawasan melekat melalui regulasi yang memihak kepentingan generasi yang akan datang.<sup>43</sup> Polanyi dan Habermas, sama-sama berbicara mengenai manusia sebagai *homo socius* di atas sistem ekonomi tanpa kontrol. Keduanya menolak pemahaman manusia semata-mata sebagai *homo economicus*, yang merupakan esensi cara pandang ekonomi neoklasik dalam membela tatanan ekonomi pasar semata-mata.

Polanyi dan Habermas menyarankan pembelaan institusi dan proses ekonomi yang mempromosikan nilai-nilai sosialisme seperti koperasi dan solidaritas sebagai hal penting yang menentukan kematangan dalam transisi menuju sistem ekonomi yang lebih partisipatoris dan terkoordinasi.<sup>44</sup> Dengan demikian, Polanyi dan Habermas tidak hanya berpikir untuk mengoreksi kapitalisme melainkan juga mengatasi Marxisme dalam apa yang mereka namakan politik ketercakupannya ekonomi dan masyarakat dalam sebuah pasar yang diatur dengan sistem hukum deliberatif.

#### CATATAN AKHIR

<sup>1</sup> Copleston, Frederick SJ, *A History of Philosophy: Greece and Rome, vol. 1*. (New York: Image Books, 1993), hal. 277.

<sup>2</sup> Aristotle “*Nicomachean Ethics*” dalam *The Basic Works of Aristotle*, diedit oleh Richard McKeon dengan introduksi oleh C. E. C. Reeve. (New York: The Modern Library, 2001), par., 1094a.

<sup>3</sup> *Ibid.*, par.1099b.

<sup>4</sup> Smith, Adam. *The Theory of Moral Sentiments*. (Oxford: Clarendon Press, 1979).

<sup>5</sup> Polanyi, Karl. *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*, Kata Pembukaan oleh Joseph E. Stiglitz dan Kata Pengantar oleh Fred Block. (Boston Beacon Press, Paperback Edition: 2001), hal. 210ff.

<sup>6</sup> Habermas, Jürgen, *The Theory of Communicative Action: Life-world and System, a Critique of Functionalist Reason*, Vol. II. Diterjemahkan dari teks berbahasa Jerman *Theorie des kommunikativen Handelns, Band 2, Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft* oleh Thomas MacCarthy. (Boston: Beacon Press, 1987), hal. 202.

<sup>7</sup> Aristotle. *Op.Cit.*, par. 1094a.

<sup>8</sup> Smith, Adam. *Op.Cit.*

<sup>9</sup> Polanyi. *Op.Cit.*, hal. 264.

<sup>10</sup> Aristotle. *Op.Cit.*,

<sup>11</sup> Polanyi. *Op.Cit.*, hal., 71.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal., 79.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal., 80-81.

<sup>14</sup> Daniel Brook, “The Great Transformation. Its Relevance Continues” dalam *American Journal of Economics and Sociology*, Vol. 53, No. 4 (Oct., 1994), hal. 401-2. Diterbitkan oleh American Journal of Economics and Sociology, Inc. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3487183>

<sup>15</sup> Elmar Alvaer, et. al., “The World Market Unbound” dalam *Review of International Political Economy*, Vol. 4, No.3 (Autumn., 1997), hal. 448. Diterbitkan dalam *The Direction of Contemporary Capitalism* oleh Taylor & Francis, Ltd. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/4177234>.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 449.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 451.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal 453.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 454.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 455-56.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 457.

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 458.

<sup>23</sup> Daniel Brook, “The Great Transformation. Its Relevance Continues” dalam *American Journal of Economics and Sociology*, Vol. 53, No. 4 (Oct., 1994), hal. 401-2. Diterbitkan oleh American Journal of Economics and Sociology, Inc. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3487183>

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 402.

<sup>25</sup> *Ibid.* hal. 432ff

<sup>26</sup> William James Booth, “On the Idea of the Moral Economy” dalam *The American Political Science Review*, Vol. 88, No. 3 (Sep., 1994), hal. 652. Diterbitkan oleh American Political Science Association. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2944801>

<sup>27</sup> Habermas, Jürgen. *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. Translated from German Text *Strukturwandel der Öffentlichkeit* by Thomas Burger with the assistance of Frederick Lawrence. (Cambridge, Mass: MIT Press, 1989), hal. 43-51.

<sup>28</sup> \_\_\_\_\_. *Communication and the Evolution of Society*. Translated from German Text *Sprachpragmatik und Philosophie* and *Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus* by Thomas McCarthy. (Boston: Beacon Press, 1979), hal. 2.

<sup>29</sup> Habermas, Jürgen. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Translated from German Text *Faktizität und Geltung: Beiträge zur Diskurstheorie des rechts und des demokratischen Rechtsstaats* by William Rehg. (Cambridge: Polity Press, 1996), hal. 127-28, 142.

<sup>30</sup> \_\_\_\_\_. *Moral Consciousness and Communicative Action*. Translated from *Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln* by Christian Lenhardt and Shierry Weber Nicholsen. (Cambridge, Mass: MIT Press, 1991), hal., 65.

<sup>31</sup> Kant, I. “Analysis of the Argument Ch. III Outline of A Critique of Practical Reason, sub judul the antinomy of freedom and necessity” dalam *Groundwork of the Metaphysic of Morals*. Translated by H.J. Paton. (New York: Harper and Row Publishers, 1964), hal. 46.

<sup>32</sup> Habermas, Jürgen. *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. Translated from German Text *Strukturwandel der Öffentlichkeit* by Thomas Burger with the assistance of Frederick Lawrence. (Cambridge, Mass: MIT Press, 1989), hal. Xv.

<sup>33</sup> \_\_\_\_\_ . *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Translated from German Text *Faktizität und Geltung: Beiträge zur Diskurstheorie des rechts und des demokratischen Rechtsstaats* by William Rehg. (Cambridge: Polity Press, 1996), hal. xxxv.

<sup>34</sup> Hegel, G. W. F. *The Philosophy of Right*. (Chicago: The University of Chicago, 1952), par. 257-273.

<sup>35</sup> *Between Facts and Norms. Op. Cit.*, hal. 287-328.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 360.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 359.

<sup>38</sup> Sue Thomas, “Reconfiguring the Public Sphere: Implications for Analyses of Educational Policy” dalam *British Journal of Educational Studies*, Vol. 52, No. 3 (Sep., 2004), hal. 228. Diterbitkan Blackwell Publishing on behalf of the Society for Educational Studies. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/1556054>

<sup>39</sup> Weidong Cao, “The Historical Effect of Habermas in the Chinese Context: A Case Study of the Structural Transformation of the Public Sphere” dalam *Frontiers of Philosophy in China*, Vol. 1, No. 1 (Jan., 2006), hal. 45. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/30209949>

<sup>40</sup> Katharyne Mitchell, “Conflicting Geographies of Democracy and the Public Sphere in Vancouver”, dalam *Transactions of the Institute of British Geographers, New Series*, Vol. 22, No. 2 (1997), hal. 162. Diterbitkan oleh Blackwell Publishing on behalf of The Royal Geographical Society (with the Institute of British Geographers) Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/622307>

<sup>41</sup> Evan Charney, “Political Liberalism, Deliberative Democracy, and the Public Sphere” dalam *The American Political Science Review*, Vol. 92, No. 1 (Mar., 1998), hal. 97. Diterbitkan oleh American Political Science Association Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2585931>

<sup>42</sup> John A. Guidry, “The Struggle to Be Seen: Social Movements and the Public Sphere in Brazil” dalam *International Journal of Politics, Culture, and Society*, Vol. 16, No. 4 (Summer, 2003), hal 493-95. Diterbitkan oleh SpringerStable URL: <http://www.jstor.org/stable/20020183>

<sup>43</sup> Razeen Sally, “Multinational Enterprises, Political Economy and Institutional Theory: Domestic Embeddedness in the Context of Internationalization” dalam *Review of International Political Economy*, Vol. 1, No. 1 (Spring, 1994), hal., 161-192. Diterbitkan oleh Taylor & Francis, Ltd. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/4177094>

<sup>44</sup> Euclid Tsakalotos, “Homo Economicus”, Political Economy and Socialism” dalam *Science & Society*, Vol. 68, No. 2 (Summer, 2004), hal., 137-160. Diterbitkan oleh Guilford Press Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/40404145>

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Aristotle. (2001). “*Nicomachean Ethics*” dalam *The Basic Works of Aristotle*, diedit oleh Richard McKeon dengan introduksi oleh C. E. C. Reeve. New York: The Modern Library.

Copleston, Frederick SJ, (1993). *A History of Philosophy: Greece and Rome, vol. 1*. New York: Image Books.

Habermas, Jürgen. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. Translated from German Text *Strukturwandel der Öffentlichkeit* by Thomas Burger with the assistance of Frederick Lawrence. Cambridge, Mass: MIT Press.

\_\_\_\_\_. (1970). *Towards a Rational Society: Student Protest, Science, and Politics*. Translated from German Text *Protestbewegung und Hochschulreform* and *Technik und Wissenschaft als Ideologie* by Jeremy J. Shapiro. Boston: Beacon Press.

- \_\_\_\_\_. (1987). *The Theory of Communicative Action: Life-world and System, a Critique of Functionalist Reason*, Vol. II. Translated from German Text *Theorie des kommunikativen Handelns, Band 2, Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft* by Thomas MacCarthy. Boston: Beacon Press.
- \_\_\_\_\_. (1991). *Moral Consciousness and Communicative Action*. Translated from *Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln* by Christian Lenhardt and Shierry Weber Nicholsen. Cambridge, Mass: MIT Press.
- \_\_\_\_\_. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. Translated from German Text *Strukturwandel der Öffentlichkeit* by Thomas Burger with the assistance of Frederick Lawrence. Cambridge, Mass: MIT Press.
- \_\_\_\_\_. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Translated from German Text *Faktizität und Geltung: Beiträge zur Diskurstheorie des rechts und des demokratischen Rechtsstaats* by William Rehg. Cambridge: Polity Press.
- Hegel, G. W. F. (1952). *The Philosophy of Right*. Chicago: The University of Chicago.
- Kant, I. (1964). *Groundwork of the Metaphysic of Morals*. Translated by H.J. Paton. New York: Harper and Row Publishers.
- Polanyi, Karl. (2001). *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*, Kata Pembukaan oleh Joseph E. Stiglitz dan Kata Pengantar oleh Fred Block. Boston Beacon Press.
- Smith, Adam. (1979). *The Theory of Moral Sentiments*. Oxford: Clarendon Press.

## ARTIKEL

- Alvater, Elmar et. al., "The World Market Unbound" dalam *Review of International Political Economy*, Vol. 4, No.3 (Autumn., 1997), hal. 448. Diterbitkan

- dalam *The Direction of Contemporary Capitalism* oleh Taylor & Francis, Ltd. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/4177234>.
- Brook, Daniel. “The Great Transformation. Its Relevance Continues” dalam *American Journal of Economics and Sociology*, Vol. 53, No. 4 (Oct., 1994), hal. 401-2. Diterbitkan oleh American Journal of Economics and Sociology, Inc. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3487183>
- Charney, Evan. “Political Liberalism, Deliberative Democracy, and the Public Sphere” dalam *The American Political Science Review*, Vol. 92, No. 1 (Mar., 1998), hal. 97. Diterbitkan oleh American Political Science Association Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2585931>
- Guidry, John A. “The Struggle to Be Seen: Social Movements and the Public Sphere in Brazil” dalam *International Journal of Politics, Culture, and Society*, Vol. 16, No. 4 (Summer, 2003), hal 493-95. Diterbitkan oleh Springer Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/20020183>
- Mitchell, Katharyne. “Conflicting Geographies of Democracy and the Public Sphere in Vancouver”, dalam *Transactions of the Institute of British Geographers, New Series*, Vol. 22, No. 2 (1997), hal. 162. Diterbitkan oleh Blackwell Publishing on behalf of The Royal Geographical Society (with the Institute of British Geographers) Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/622307>
- Sally, Razeen. “Multinational Enterprises, Political Economy and Institutional Theory: Domestic Embeddedness in the Context of Internationalization” dalam *Review of International Political Economy*, Vol. 1, No. 1 (Spring, 1994), hal., 161-192. Diterbitkan oleh Taylor & Francis, Ltd. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/4177094>
- Sue Thomas, “Reconfiguring the Public Sphere: Implications for Analyses of Educational Policy” dalam *British Journal of Educational Studies*, Vol. 52, No. 3 (Sep., 2004), hal. 228. Diterbitkan Blackwell Publishing on behalf of the Society for Educational Studies. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/1556054>
- Tsakalotos, Euclid. “Homo Economicus”, Political Economy and Socialism” dalam

*Science & Society*, Vol. 68, No. 2 (Summer, 2004), hal., 137-160. Diterbitkan oleh Guilford Press Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/40404145>

Weidong Cao, “The Historical Effect of Habermas in the Chinese Context: A Case Study of the Structural Transformation of the Public Sphere” dalam *Frontiers of Philosophy in China*, Vol. 1, No. 1 (Jan., 2006), hal. 45. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/30209949>

William James Booth, “On the Idea of the Moral Economy” dalam *The American Political Science Review*, Vol. 88, No. 3 (Sep., 1994), hal. 652. Diterbitkan oleh American Political Science Association. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2944801>